

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (ISAK) NO 35 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS BERORIENTASI NONLABA (STUDI KASUS PADA PARTAI POLITIK
PKS)**

Devina Andini, Sanrina Indriati Putri, Elita Venda Anggraeni

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

ABSTRAK

Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS), sebuah organisasi nirlaba, merupakan tempat penelitian dilaksanakan. Tujuan penelitian berikut yakni sebagai pengetahuan terhadap praktik pelaporan keuangan PKS telah mematuhi pedoman ISAK No. 35. Metode analisis deskriptif komparatif digunakan untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan, dan membandingkan data. Temuan dan rekomendasi penelitian menggambarkan bagaimana laporan keuangan PKS tidak disusun sesuai pedoman ISAK No. 35 untuk pelaporan keuangan nirlaba. Selain itu, laporan partai juga mencakup laporan pertanggungjawaban yang harus mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018.

Kata Kunci: ISAK No 35, Entitas Nirlaba

ABSTRACT

The Prosperous Justice Political Party (PKS), a non-profit organization, is where the research was conducted. The aim of the following research is to gain knowledge about PKS financial reporting practices that comply with ISAK No. 35. The comparative descriptive analysis method is used to describe, describe and compare data. The research findings and recommendations illustrate how PKS's financial reports were not prepared according to ISAK No. 35 for nonprofit financial reporting. Apart from that, the party report also includes an accountability report which must comply with Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 36 of 2018.

Keywords: ISAK No. 35, non-profit entity

PENDAHULUAN

Badan usaha dan organisasi nirlaba mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Perbedaan utamanya berakar pada bagaimana suatu organisasi memperoleh sumber dibutuhkan menjalankan fungsi operasionalnya. Sumber daya diperoleh oleh organisasi nirlaba penyedia sumber daya yang tidak menuntut pembayaran atau keuntungan finansial sebanding dengan volume sumber daya yang dikontribusikan. Kualitas-kualitas ini menyebabkan beberapa transaksi, seperti penerimaan donasi, sering terjadi di organisasi nirlaba atau bahkan tidak pernah terjadi di badan usaha. Namun pada

kenyataannya, organisasi nirlaba seringkali memiliki bentuk yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk membedakannya dari jenis bisnis lainnya. Dewan Standar Akuntansi Keuangan menyetujui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35, Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, pada tanggal 11 April 2019, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada organisasi nirlaba. ISAK ini memperbarui PSAK No. 45 yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2011 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Ilustrasi organisasi nirlaba yang pelaporan keuangannya mengikuti ISAK No. Partai politik (parpol) 35.

Standar penyajian laporan keuangan dapat membantu membakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan organisasi dan entitas nirlaba. Laporan keuangan dibuat transparan dan akuntabel, disajikan sesuai standar ISAKK No. 35, memungkinkan pengguna melihat kegiatan program yang sudah selesai dan anggaran yang digunakan sebagai pertanggungjawaban dana dari donatur. Partai politik adalah organisasi nasional yang didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan tujuan bersama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sambil memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 34 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa sumbangan hukum, iuran anggota, dan dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan sumber politik. pendanaan partai. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, partai politik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai Laporan Keuangan secara berkala.

Permasalahan penelitiannya adalah apakah penerapan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba oleh PKS telah sesuai dengan ISAK No. 35, berdasarkan uraian latar belakang yang telah diberikan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan apakah penerapan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang dilakukan PKS sudah sesuai dengan ISAK No.35.

METODE PENELITIAN

Membandingkan penerapan ISAK No. 35 di lapangan yang mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba parpol melalui penerapan ISAK No. 35 pada partai politik, penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Memperoleh data untuk keperluan penelitian dikenal dengan istilah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengaturan dari berbagai sumber dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan data. Dokumentasi adalah teknik yang dipakai penelitian berikut dalam mendapatkan data. Proses pengumpulan data melalui pemeriksaan atau pencatatan

terhadap bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, arsip, kertas, angka tertulis, dan gambar dalam bentuk laporan dan data yang dapat membantu penelitian, disebut dengan dokumentasi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan masjid dicantumkan dalam makalah penelitian, termasuk buku catatan, catatan, dan dokumentasi pendukung lainnya, serta uang masuk dan keluar. Keunggulan metode penelitian ini adalah menghasilkan sumber dokumen tertulis dari informan terpercaya yang tidak dapat disangkal kebenarannya, memberikan informasi untuk menunjang penulisan berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah parpol yang berlandaskan Islam. Lahir dari pertentangan beberapa tokoh Islam terhadap Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia, yang bersikeras agar Pancasila menjadi pedoman seluruh ormas. Pertentangan tersebut memunculkan gerakan tarbiyah. Pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto, gerakan tarbiyah ini mendirikan organisasi dakwah kampus yang selanjutnya menjadi pendorong berdirinya PKS pada 20 Juli 1998. Setelah gagal mencapai ambang batas parlemen sebesar 2%, Partai Keadilan berganti nama menjadi PKS pada tanggal 20 April 2002

Analisis Deskriptif Implementasi PSAK No 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

Laporan keuangan PKS menjadi landasan penelitian dalam mengetahui pedoman dalam ISAK No. 35 telah dipatuhi dalam penyajiannya, selanjutnya laporan keuangan akan menjadi pembandingan pada pemaparan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar tersebut. Penyajian ini meliputi laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

a. Format Pelaporan Keuangan

Bagian Keuangan PKS yang meliputi pengurus Bendahara, Bagian keuangan, Wakil Bendahara Tawaran. Penawaran Wakil Bendahara dan Penggalangan Dana. Asset Management, bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan partai.

Format laporan pertanggungjawaban keuangan PKS adalah sebagai berikut.

PKS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DPP PKS
TAHUN ANGGARAN 2023

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut:

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Berikut dengan tugas dan fungsi partai politik serta penerima pendanaan: anggaran yang digunakan mengenai pendidikan politik.			Rp. 7.516.456.526	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi umum			Rp. 305.845.077	
	a. kepegawaian ATK			Rp. -	
	b. ruang internal sekretariat			Rp. -	
	c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik			Rp. -	
	d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			Rp. 1.424.015.000	
	e. pengkhusasan inventaris kantor			Rp. 1.764.490.000	
	f. sewa kantor, atau			Rp. -	
	g. honorarium sekretariat			Rp. -	
	2. Langgaman Denda dan Jaka			Rp. 474.828.497	
	a. selpon, internet dan listrik			Rp. -	
	b. ar. rumah sekretariat			Rp. -	
	c. jasa pos dan giro			Rp. -	
	d. sewa-menyewa, atau			Rp. 48.972.000	
	e. media cetak dan elektronik			Rp. -	
	3. Peneliharaan data dan arsip			Rp. -	
	a. Penyiapan data elektronik			Rp. -	
	b. Penyiapan data manual			Rp. -	
	4. Peneliharaan Peralatan kantor			Rp. 21.136.000	
	a. Penyiapan data elektronik			Rp. -	
	b. Penyiapan data manual			Rp. -	
C	S A L I D O			11.493.662.000	

Mengetahui :
PRESIDEN
(AIMAD SYAKHU)

PKS
PARTAI KEMBARA UMUM
MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA
nd
(TITO KARNAVIAN)

Dewan Pengarah Partai Politik Nasional Indonesia
400 Building, Jl. T. B. Simanungkalong No. 82, Pusat Kegiatan Nasional, DKI Jakarta 10270
021-55000000 Fax: 021-55000000 Email: sekretariat@pkpni.org

Tabel laporan pertanggungjawaban menjelaskan format tersebut hanya mencatat kas masuk dan keluar, tidak mencakup aktivitas, arus kas, posisi keuangan, atau catatan laporan keuangan mengacu ISAK No. 35. Sebaliknya, PKS hanya menggunakan laporan keuangan lugas, sederhana agar dapat dipahami

Klasifikasi Aset dan Liabilitas

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PKS tidak mengklasifikasikan asetnya sebagai aset lancar atau tidak lancar, dan juga tidak mengklasifikasikan kewajibannya sebagai jangka panjang atau pendek dalam pelaporan keuangan.

b. Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat

Penggunaan aset bersih yang dibatasi penggunaannya, atau sumber daya atau kontribusi tertentu, dibatasi; di sisi lain, aset bersih yang tidak dibatasi, kontribusi yang diberikan tidak dibatasi penggunaannya sebagai donor tertentu. Dana donor tidak dibatasi siapa yang dapat menggunakannya, sesuai laporan pertanggungjawaban PKS, namun PKS tidak menyatakan hartanya sebagai kekayaan bersih yang tidak dibatasi.

c. Perubahan Kelompok Aset Neto

Aset PKS tidak dibatasi penggunaannya, yang tidak diungkapkan karena pencatatan PKS hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran serta laporan keuangan partai tidak menunjukkan perubahan kelompok kekayaan bersih. Karena PKS tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan, PKS tidak menyajikan kelompok aset yang diubah.

e. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian

Sumbangan dari pemerintah tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dilaporkan sebagai penambah kekayaan bersih tidak terikat pada laporan keuangan PKS; sebaliknya disajikan sebagai laporan dalam bentuk laporan kegiatan.

f. Informasi Pendapatan dan Beban

Pengeluaran dan pendapatan dalam laporan keuangan PKS tidak ada secara bruto.

g. Informasi Pemberian Jasa

Laporan pertanggungjawaban PKS jelas menunjukkan bahwa PKS terus memantau pengeluaran terkait inisiatif operasional partai dan pendidikan politik.

h. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Laporan tersebut menunjukkan, bahwa parpol tidak mengkategorikan pengeluaran dan penerimaan sesuai ISAK No.35.

Perbandingan Indikator pada ISAK No 35 dengan Pelaporan Keuangan PKS

NO	INDIKATOR	MENURUT ISAK NO 35	LAPORAN KEUANGAN PKS	KET
1	Format pelaporan	Didalamnya terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan; 2. kegiatan; 3. arus kas periode pelaporan 4. Catatan	Hanya penerimaan dan pengeluaran kas yang ditampilkan dalam laporan keuangan yang disusun PKS.	Tidak sesuai
2	Klasifikasi aset dan liabilitas	mengumpulkan aset dan liabilitas dalam kelompok yang relatif homogen dengan atribut yang sebanding. Informasi mengenai likuiditas diberikan dengan cara yang dijelaskan di bawah ini: 1. Kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo dan aset lancar berdasarkan urutan likuiditas	Aset tidak lancar, aset tidak sesuai urutan likuiditasnya, serta informasi mengenai aset dan liabilitas tidak diungkapkan dalam laporan PKS. Hanya berisi rincian tentang penerimaan kas.	Tidak sesuai

		2. Urut kewajiban pada kategori jangka panjang & pendek, serta aset ke dalam kategori tidak lancar dan lancar 3. Mencantumkan informasi pada catatan mengenai batas penggunaan aset, misalnya informasi mengenai jatuh tempo atau likuiditas liabilitas.		
3	Klasifikasi aset neto terikat/tidak	Jumlah masing-masing kelompok kekayaan bersih disajikan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh penyedia sumber daya yang tidak membayar, khususnya: 1. Tidak terikat; 2. Terikat sementara; dan 3. Terikat tetap. Besarnya pembatasan, baik yang bersifat sementara maupun permanen, diungkapkan dengan menunjukkannya catatan laporan keuangan	Jangan mengkategorikan jumlah aset bersih setiap kelompok berdasarkan batasan penyedia sumber daya. Misalnya tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen. Hanya jumlah total bantuan keuangan yang diberikan yang ditampilkan dalam laporan keuangan partai.	Tidak sesuai
4	Perubahan Kelompok Aset Neto	Besarnya perubahan kekayaan bersih yang terikat sementara, tidak terikat suatu periode, dan terikat pada	Laporan kegiatan, termasuk penyesuaian kekayaan bersih yang tidak terikat, terikat sementara,	Tidak sesuai

		pemanen disajikan dalam laporan kegiatan.	dan terikat permanen, tidak disediakan oleh pihak. Satu-satunya tanda terima yang ditawarkan partai adalah dalam bentuk tunai.	
5	Klasifikasi Beban, Pendapat, kerugian&keuntungan	Laporan aktivitas menunjukkan kerugian &keuntungan, diakui pada aset dan investasi (atau liabilitas) lainnya untuk pengurangan atau tambah aset bersih yang tidak dibatasi penggunaannya, kecuali penggunaannya dibatasi. Kontribusi disajikan sebagai tambahan aset bersih tidak dibatasi penggunaannya, dibatasi permanen/dibatasi sementara, tergantung apakah terdapat pembatasan. Sumbangan yang dibatasi dan tidak lagi tunduk pada pembatasan pada waktu sama yang dijadikan untuk sumbang yang tidak dibatasi asal hal tersebut konsisten /diungkapkan untuk kebijakan akuntansi.	Arus kas terkait aktivitas pengungkapan dan pendanaan informasi investasi non tunai dan aktivitas pendanaan tidak dipisahkan. Yang ditawarkan hanyalah uang masuk dan uang keluar.	Tidak sesuai

6	Informasi beban 7 pendapatan	Menyajikan seluruh pendapatan & beban bruto.	tidak termasuk informasi tentang pengeluaran dan pendapatan kotor	Tidak sesuai
7	Informasi pemberian jasa	Informasi mengenai pengeluaran wajib disajikan dalam laporan kegiatan atau catatan atas laporan keuangan berdasarkan klasifikasi fungsional, misalnya kelompok program pelayanan primer dan kegiatan penunjang.	Informasi beban, khususnya inisiatif operasional partai, dan pendidikan politik disediakan oleh Partai PKS.	Tidak sesuai
8	Klasifikasi pengeluaran & penerimaan kas	Dengan tambahan sebagai berikut, laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas: 1. Usaha keuangan: a) Sumbangan tunai dari kontributor yang penggunaannya dibatasi waktu. b) Pendapatan sumbangan dan investasi dalam bentuk tunai, yang hanya dapat digunakan untuk membangun, membeli, dan memelihara aset tetap atau menambah dana abadi. c) Dividen dan bunga hanya diperbolehkan untuk penggunaan jangka panjang.	Arus kas terkait pengungkapan dan aktivitas pendanaan investasi non tunai dan aktivitas pendanaan tidak dipisahkan. Yang ditawarkan hanyalah uang masuk dan uang keluar.	Tidak sesuai

2. Berbagi informasi tentang pendanaan non-tunai dan kegiatan investasi, seperti hadiah real estat atau properti investasi.

PEMBAHASAN

Kedelapan indikator ISAK No. 35 tidak selaras dengan pelaporan keuangan Partai Keadilan Sejahtera, sebagaimana terlihat pada tabel indikator ISAK No. 35 dan pelaporan keuangan Partai PKS.

Minimnya laporan posisi keuangan, laporan kegiatan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan PKS merupakan indikasi pertama dari format yang digunakan dalam pelaporan keuangan. PKS tidak memberikan informasi mengenai aset dan liabilitas, yang merupakan indikasi kedua, liabilitas dan klasifikasi aset. PKS tidak memaparkan kekayaan bersih yang terikat atau tidak terikat, yang merupakan indikator ketiga dalam penggolongan kekayaan bersih. PKS tidak menunjukkan perubahan kekayaan bersih sehingga menjadi indikator perubahan kelompok kekayaan bersih yang keempat. Pengklasifikasian pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian merupakan pokok bahasan dari indikator kelima.

Penghasilan tidak ditunjukkan oleh PKS selain harta, penghasilan, atau kerugian. PKS tidak mencantumkan indikasi keenam pendapatan dan pengeluaran bruto. Indikator ketujuh berkaitan dengan informasi mengenai pemberian layanan; PKS tidak menyediakan data beban yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. PKS rincian arus kas.

Sebab, laporan PKS merupakan laporan pertanggungjawaban yang tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan parpol. Oleh karenanya disimpulkan, dalam membuat laporan keuangan sebuah tugas sulit, terutama bagi organisasi nirlaba yang memiliki pendanaan terbatas dan ruang lingkup yang terbatas.

Mirip dengan PKS, dalam menghadapi tantangan dalam melaksanakan ISAK No. 35 karena kurangnya sumber daya, termasuk kebutuhan untuk memperoleh aset yang tidak ada, mempekerjakan pengurus partai tanpa pengalaman sebelumnya di bidang akuntansi atau ekonomi, dan melayani pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. daerah pedesaan. Cukup kirimkan laporan pertanggungjawaban yang merinci bagaimana uang itu digunakan. Oleh karena itu, sulit untuk menerapkan ISAK No. 35 pada pelaporan

keuangan PKS. Meski demikian, mampu mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dengan merangkum temuan penelitian dan pembahasan penulis tentang pengungkapan transparansi laporan keuangan PKS sesuai dengan prinsip tanggung jawab transparansi:

1. Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35, PKS belum menerapkan pelaporan keuangan.
2. Satu-satunya cara mencatat keuangan adalah mencatat uang masuk dan keluar, lalu dibagikan kepada masyarakat secara keseluruhan.
3. Pengurus PKS belum menyelesaikan inventarisasi asetnya.

Saran

Beberapa rekomendasi yang penulis berikan kepada pengurus PKS sehubungan dengan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen PKS harus menyelesaikan keseluruhan prosedur siklus akuntansi untuk menerapkan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35. Untuk melakukan hal ini, perlu diingat
2. Pelaporan keuangan masjid yang terorganisir dengan baik sangat diperlukan mengingat banyaknya jumlah penerimaan dan pengeluaran keuangan.
3. Setiap pengurus PKS membeli sesuatu atau mendapat hibah, harus membuat pencatatan harta kekayaan.
4. Pengurus PKS hendaknya melatih sejumlah pengurus yang paham tata cara pembuatan laporan keuangan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Pengurusan Pusat Partai Sejahtera. LPJ dana Banpol (2022).
Ikatan Akuntan Indonesia. (2020) SAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba .Indonesia:Ikatan AKuntan Indonesia.
Muchlisin Riadi (2021).Partai Politik - Pengertian, Karakteristik, Fungsi dan Jenis. Indonesia: KajianPustaka
Wikipedia. (2023). Partai Keadilan Sejahtera. Indonesia: ensiklopedia bebas.